

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA KAMPUNG SAPALEK DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Irsan Yelipele¹⁾, Musi Gwijange²⁾

^{1,2)}UNA'IM Yapis Wamena, Jl. Hom-hom wamena
Email: irsanpele308gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini merupakan variabel mandiri dengan indikatornya: Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat harga. Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan sampel random sampling ukuran sampel di tentukan menggunakan formula slovin sebanyak 20 Kk. Analisa data yang di gunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya di peroleh skor sebesar 53,1 yang berada pada predikat cukup baik. Hasil ini diperoleh dari indikator tepat sasaran dengan skor 51,3, tepat jumlah dengan skor 45,3, tepat harga dengan jumlah skor 51,3, tepat waktu dengan jumlah skor 56 tepat kualitas dengan jumlah skor 59,6 dan tepat administrasi dengan jumlah skor 57,4.

Kata kunci: Efektivitas; Pelaksanaan; Program; Sejahtera;

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Prosperous Rice Program in Sapalek Village, Napua District, Jayawijaya Regency. This study used independent variables with the following indicators: Right on Target, Right on Quantity, Right on Quality, Right on Time, Right on Administration, and Right on Price. The author used random sampling for sampling, with a sample size of 20 families determined using the Slovin formula. Data analysis used descriptive quantitative analysis using scores. The results indicate that the effectiveness of the Prosperous Rice Program in Sapalek Village, Napua District, Jayawijaya Regency achieved a score of 53.1, which is considered quite good. This result was obtained from the indicators of Right on Target (51.3), Right on Quantity (45.3), Right on Price (51.3), Right on Time (56), Right on Quality (59.6), and Right on Administration (57.4).

Keywords: Effectiveness, Implementation, Program, Welfare.

I. PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat undang-undang dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinann, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi perhatian pemerintah, terutama

penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun demikian, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berbagai kebijakan pemerintah telah diimplementasikan, namun hanya terkesan upaya untuk mencapai suatu tujuan.

Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan masyarakat selama ini belum menyentuh esensi kehidupan masyarakat miskin itu sendiri sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007 bahwa Indonesia masih

menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh kebawah garis kemiskinan (Anonimous, 2007).

Beras sejahtera merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Beras Sejahtera termasuk bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada Kluster I, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Instruksi presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Program Beras Sejahtera merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing-masing keluarga akan menerima minimal 15 kg/ KK / bulan dengan harga Rp. 1.600 / kg di titik distribusi.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program Beras Sejahtera sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Program Beras Sejahtera merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program Beras Sejahtera, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat Pusat sampai ketinggian Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; mulai dari

perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Untuk menjamin efektivitas pengelolaan program Beras Sejahtera, maka pemerintah menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) Beras Sejahtera tersebut.

Selama ini pelaksanaan Program Beras Sejahtera tidak lepas dari berbagai permasalahan dan hambatan. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh masyarakat Kampung Sapalek, antara lain: (1). tidak tepat sasaran pelaksanaan beras sejahtera seharusnya yang layak dapat sebagian tidak dapat (masyarakat) dan tidak layak dapat, dapat (pegawai), (2). Jumlah program beras sejahtera tidak sesuai sebab seharusnya satu KK di dapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu, 15 kg/ bulan atau 180 kg / tahun tetapi di dapatkannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada malahan di dapatkan oleh KK di bawah dari ketentuan, (3). Harga beras sejahtera tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasaran, (4). Waktu pelaksanaan program beras sejahtera tidak sesuai jadwal atau agenda yang di tentukan oleh pemerintah, (5). Kualitas beras sejahtera sering di temukan oleh masyarakat banyak abu dan kotor dan (6). Administrasi sering kali tidak tepat dan tidak lengkap sesuai populasi KK sehingga dalam pembagian beras sebagian tidak dapat atau volume yang kurang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program beras masih bermasalah terutama bagi masyarakat yang belum urus KK dan KTP otomatis data tidak masuk di pemerintahan sehingga tidak bisa mendapatkan beras karena kuota yang dikeluarkan atau salurkan ke masyarakat sesuai data tersebut.

Hasil pengamatan awal dan wawancara dengan Kepala Kampung Sapalek Tanggal 06 April 2020 maka, penulis mengindikasikan bahwa pengelolaan program beras sejahtera untuk rumah tangga miskin belum seluruhnya efektif, terutama dilihat dari aspek jumlah kelompok sasaran, volume beras, harga, kualitas beras, waktu dan administrasi sehingga dapat dipastikan belum optimal memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin di Kabupaten Jayawijaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handyaningrat (1994), yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1). Produktivitas, 2). Kemampuan adaptasi kerja, 3). Kepuasan kerja, 4). Kemampuan berlabar, 5). Pencarian sumber daya. Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Konsep Pelaksanaan

Menurut Usman (Usman, 2002) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan sebagai berikut “Pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian pelaksanaan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut setiawan dalam bukunya yang berjudul pelaksanaan dalam

birokrasi pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan sebagai berikut: "Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif". (Setiawan, 2004). Menurut harsono (2002) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan sebagai berikut: "Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dikatakan bahwa pelaksanaan merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Program Beras Sejahtera

Menurut Pedum Rastra 2015, Rastra merupakan program implementasi dari instruksi presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaasan stabilitas ekonomi nasional. Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra dulog atau subdulog adalah unit kerja dibawah dulog atau subdulog yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras pelaksana distribusi. Menurut Winarni (2012), Rastra yaitu untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu. Menurut Pedum Rastra 2015, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Rastra adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
- c) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- d) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.

- e) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- f) Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- g) Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- h) Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Rastra Pusat.

Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Beras Sejahtera

Faktor-faktor yang menghambat Rastra Menurut Taufik dan Sahuri (2014), penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, bahwa dalam penelitiannya yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perundangan mengenai Rastra dan yang berkaitan dengan sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia dan dana yang digunakan karena ketidakvalidan penerima program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penghambat implementasi distribusi Rastra yaitu faktor internal faktor dari dalam yang berasal dari SDM, yakni faktor dari masyarakat yang menginginkan Rastra di bagi rata dengan alasan agar tidak ada kecemburuan sosial. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, faktor yang berasal dari perangkat desanya, atau faktor dari pemerintah yakni kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Rastra, kurangnya sosialisasi mengenai Rastra dan peraturan perundangan. Program ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pendistribusiannya masih kurang tepat dan kurang efektif.

Tujuan, Sasaran dan Manfaat Beras Sejahtera

Adapun tujuan, sasaran dan manfaat Rastra Menurut pedum Rastra 2015 adalah:

- a. Tujuan Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- b. Sasaran Rastra tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/RTS/bulan.
- c. Manfaat Rastra adalah peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras di pasaran, pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional, serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2014), bahwa tujuan Rastra adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan Sosial:

Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (Bila diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 juta jiwa dengan cartatan harga makanan lain tidak berubah (P4S, Bappenas, 2013). Memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat. Efektifitas rasta sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan *income transfer* dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin.

2) Stabilisasi Harga Beras & Pengendali Inflasi:

Secara deskripsi terlihat bahwa pada saat rastra rendah dalam penyaluran, terdapat beberapa titik harga beras dan andil beras dalam inflasi yang meningkat.

3) Peningkatan Produksi Beras Dalam Negeri:

Program Rastra tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani. Melalui pengadaan beras untuk Rastra ini, kita harapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, sehingga swasembada beras tetap dapat dipertahankan.

Indikator Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Beras Sejahtera

Sasaran penerima Rastra adalah masyarakat miskin, untuk mengurangi beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras. Menurut

BULOG (2012), sebagai dasar pelaksana Rastra digunakan data dari pihak BPS untuk menentukan masyarakat miskin yang berhak menerima Rastra. Menurut BPS (dalam Almasri, 2013) bahwa dalam penentuan indikator kemiskinan pada satu rumah tangga adalah:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut BPS Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Dalam penentuan penerima Rastra hasil dari verifikasi data dari BPS juga melalui musyawarah Desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat.

Pelaksanaan Distribusi Beras Sejahtera di Desa atau Kelurahan atau Pemerintah setingkat

Menurut pedum Rastra 2015, bahwa kepala desa atau lurah atau kepala pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Rastra diwilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi Rastra diwilayahnya, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Pelaksana distribusi Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa atau lurah atau pemerintah setingkat.

b. Tugas

Pelaksana distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana distribusi mempunyai fungsi, Pemeriksaan dan penerimaan atau penolakan Rastra Perum Bulog di Titik Distribusi (TD). Untuk desa atau kelurahan atau pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di desa atau kelurahan atau pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima atau menolak raskin di atas dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

d. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada RTS-PM yang terdapat dalam Model Daftar Penerimaan Manfaat (DPM) rastra di desa atau kelurahan di Titik Bagi (TB).

e. Penerima Harga Tebus Rastra (HTR) dari RTS-PM secara tunai untuk disektorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka dapat disetorkan langsung secara tunai kepada Perum Bulog.

f. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi (TD).

g. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim kordinasi Rastra kabupaten atau melalui Tim Koordinasi Rastra kecamatan.

h. Dalam mekanisme pelaksanaan penyaluran Rastra menurut TNP2K (2012), adalah: Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). Beras Rastra disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati

oleh Perum BULOG dan Pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab mendistribusikan Rastra dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Rastra kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Rastra.

Setelah menguraikan teori, pengertian dan regulasi tentang efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera maka akan menghasilkan menghasilkan indikator yang akan di jadikan penilaian Menurut Pedum dan Hastuti (2012)

1. Tepat sasaran penerima manfaat: Rastra hanya diberikan kepada RTS yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Rastra (DPM) hasil verifikasi data PPLS 2008 BPS melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh camat.
2. Tepat jumlah: jumlah beras Rastra yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
3. Tepat harga: harga tebus Rastra sesuai kualitas.
4. Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat kualitas: terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.
6. Tepat administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Namun dalam pelaksanaannya program Rastra yang sudah berjalan dalam beberapa tahun ini masih saja terdapat beberapa faktor penghambat. Masalah ketidak tepatan pembagian menjadi salah satu masalah yang cukup serius didaerah manapun yang ada di Indonesia. Terdapat banyak kendala di dalam pelaksanaan program beras sejahtera sampai saat ini belum efektif dalam pembagian dan hal-hal lainnya khususnya di Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif yang berusaha mendiskripsikan dan merumuskan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti. Menurut sugiyono (2009), penelitian deskriptif adalah prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian dan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini di dasarkan atas pemikiran dan alasan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan suatu fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada lokasi penelitian puskesmas di distrik welesi kabupaten jayawijaya. Kemudian Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian adalah *Kuesioner* dengan menggunakan rata-rata pengukuran dan modus. Rata-rata pengukuran mulai dari angka 1-4, dengan kategori pilihan sebagai berikut : Sangat baik = 4, Cukup baik = 3, Kurang baik = 2, Tidak baik = 1.

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data penilaian, mendapatkan data dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai sumber teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut; Kajian kepustakaan, Pengamatan (*Observasi*) dan Kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Melalui analisis ini hasil penelitian diuraikan untuk memperoleh gambaran dan angka – angka yang jelas terhadap objek penelitian yang diteliti. Menurut Hasan (2006), teknik analisa data suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau data ringkasan dengan menggunakan cara – cara atau rumus – rumus tertentu. Pengelolaan data bertujuan untuk mengubah data menta dari hasil pengukuran menjadi data yang menjadi lebih halus, sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil analisa data maka dapat di dibahas sebagai berikut :

Indikator Tentang tepat sasaran

Indikator tentang tapat sasaran yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Rata-Rata Indikator Tentang tepat sasaran

Pertanyaan	Skor				Rata-rata
	4	3	2	1	
Program beras sejahtera tepat pada sasaran	32	30	2	1	65
Dalam pembagian beras sejahtera tepat pada sasaran	16	6	1	5	45
Pemerintah pendistribusian beras sejahtera tepat pada sasaran	12	9	1	5	44
Rata-rata					51,3
<i>Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020</i>					

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator tepat sasaran adalah 51,3 cukup baik. Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan tepat sasaran dalam pendistribusian beras sejahtera kepada tingkat pemerintah kampung sampai di masyarakat menunjukkan cukup baik. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tepat sasaran dalam pendistribusian beras sejahtera cukup baik

Indikator Tentang tepat jumlah

Indikator tentang tepat jumlah yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Rata-Rata Indikator Tentang tepat jumlah

Pertanyaan	Skor				Rata-rata
	4	3	2	1	
Jumlah beras sesuai ketentuan	0	18	1	5	41
Dalam pembagian jumlah beras satu KK sesuai ketentuan	20	18	8	5	51
Pemerintah salurkan beras sejahtera ke kampung sesuai jumlah	12	9	1	5	44
Rata-rata					45,3

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator tepat jumlah adalah 45,3 kurang baik. Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan tepat jumlah dalam pendistribusian beras sejahtera kepada tingkat pemerintah kampung ke

masyarakat menunjukkan kurang baik. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tepat jumlah dalam pendistribusian beras sejahtera sampai ke masyarakat baik.

Indikator Tentang tepat harga

Indikator tentang tepat jumlah yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Rata-Rata Indikator Tentang tepat harga

Pertanyaan	Skor				Rata-rata
	4	3	2	1	
Harga beras 1 kg sesuai ketentuan secara menyeluruh	24	18	6	5	53
Harga beras tidak sesuai ketentuan	20	30	8	1	59
Harga beras tepat sesuai ketentuan	12	12	10	8	42
Rata-rata					51,3

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator tepat harga adalah 51,3 sangat baik. Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan tepat harga beras sejahtera yang dapat di terima oleh masyarakat menunjukkan sangat baik. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tepat harga beras sejahtera sampai ke masyarakat sama secara nasionala maka menunjukkan sangat baik.

Indikator Tentang tepat waktu

Indikator tentang tepat waktu yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Rata-Rata Indikator Tentang tepat waktu

Pertanyaan	Skor				Rata-rata
	4	3	2	1	
Penerima beras sesuai tepat waktu	16	30	10	1	57
Beras sejahtera sesuai tepat waktu	12	30	10	2	54
Pemerintah salurkan beras tidak tepat waktu	12	36	8	1	57
Rata-rata					56

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator tepat waktu adalah 56 cukup baik. Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan tepat waktu dalam pendistribusian beras sejahtera kepada tingkat pemerintah kampung ke masyarakat menunjukkan cukup baik. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tepat waktu dalam pendistribusian beras sejahtera sampai ke masyarakat tepat waktu maka menunjukkan cukup baik.

Indikator Tentang tepat kualitas

Indikator tentang tepat kualitas yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Rata-Rata Indikator Tentang tepat kualitas

Pertanyaan	Skor				Rata-rata
	4	3	2	1	
Salurkan beras ke masyarakat kualitas baik	16	39	4	1	60
Kualitas program beras	20	30	8	1	59
Kualitas beras dalam pembagian	16	33	10	1	60
Rata-rata					59,6

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator tepat kualitas adalah 59,6 cukup baik. Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan tepat kualitas dalam pendistribusian beras sejahtera kepada tingkat pemerintah kampung ke masyarakat menunjukkan cukup baik. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tepat kualitas dalam pendistribusian beras sejahtera sampai ke masyarakat kualitas berasnya puas di rasakan maka menunjukkan cukup baik.

Indikator Tentang tepat administrasi

Indikator tentang tepat jumlah yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Rata-Rata Indikator Tentang tepat administrasi

Pertanyaan	Skor				Rata-rata Skor
	4	3	2	1	
Persyaratan sesuai benar dan lengkap	12	33	10	1	56
Persyaratan sesuai tepat waktu	16	30	10	1	57
Persyaratan sesuai secara benar, lengkap dan tepat waktu	12	42	4	1	59
Rata-rata					57,3

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator tepat administrasi adalah 57,3 sangat baik. Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan tepat administrasi untuk mengurus agar bisa mendapatkan beras sejahtera maka, menunjukkan sangat baik. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tepat administrasi agar bisa mendapatkan beras sejahtera maka menunjukkan sangat baik.

Rekapitulasi rata-rata pada variabel efektivitas pelaksanaan program beras sejahterah.

Indikator	Skor	Predikat
Tepat sasaran	51,3	Cukup baik
Tepat jumlah	45,3	Kurang baik
Tepat harga	51,3	Sangat baik
Tepat waktu	56	Cukup baik
Tepat kualitas	59,6	Cukup baik
Tepat administrasi	57,4	Sangat baik
Rata -rata	53,1	Cukup baik

Sumber data: primer diolah tahun 2020

Berdasarkan pada tabel: 4. 29 di atas bahwa efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera kampung sapalek saat ini dengan memperoleh nilai skor 59,6 dengan kategori cukup baik. Seluruh skor hasil penghitungan untuk semua indikator berada pada predikat cukup baik. Berdasarkan hasil pada tabel 4. 29 di atas menunjukkan skor tertinggi berasal dari indikator tepat kualitas dengan skor 59,6 yang berada pada predikat cukup baik, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera cukup baik. Dalam pelaksanaan program beras sejahtera kampung sapalek dengan pendistribusian sesuai jumlah KK dan data penduduk berdasarkan berdomisili di kampung sapalek sehingga

penyaluran beras ke masyarakat cukup merata dan baik kecuali bagi masyarakat yang belum urus atau memiliki KK otomatis belum bisa mendapatkan beras tersebut dan skor terendah berasal dari indikator tepat jumlah dengan skor 45,3 yang berada pada predikat kurang baik. Dalam pelaksanaan penyaluran beras ke masyarakat seringkali menerima jumlah yang tidak sesuai dan ketika pendistribusian juga ada potongan oleh pemerintah kampung sehingga belum efektif dalam pelaksanaan program beras sejahtera menyalurkan ke masyarakat khususnya kampung sapalek. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Ayu wahyuni dengan judul penelitian Impementasi kebijakan Rastra (rumah tangga sasaran) studi kasus desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rastra di desa Toapaya Selatan belum terlaksana dengan efektif dan maksimal mengingat masih adanya kendala dalam tahap pendistribusian dan adanya pengaruh dari luar.

V. KESIMPULAN

Rata-rata variabel efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya dengan indikator yaitu: a. tepat sasaran adalah 51,6 cukup baik. b. tepat jumlah adalah 45,3 kurang baik. c. tepat harga adalah 51,3 sangat baik d. tepat waktu adalah 56 cukup baik. e. tepat kualitas adalah 59,6 cukup baik f. tepat administrasi adalah 53,6 sangat baik. Jadi efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera kampung sapalek dengan skor 53, 6 predikat cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

Almasri. (2013). *Efektivitas Sistem Pendistribusian Raskin Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin*. EL-RIYASAH Vol 4, No 1 (2013): Desember 2013 page 36-47. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/ind>, diakses pada tanggal 22 September 2015 pukul: 18:45 WIB

Arimbi. (1993). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan*. Jakarta: PT.Elexa Raya

Aswardi. (2014). *Implementasi Raskin di kecamatan Ternate Riantang Kabupaten Bone*.

BPS. (2015). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen*. <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul: 15:23: 58 WIB.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2015. *Rakin Berubah Menjadi Rastra*. Diakses pada tanggal 28 September 2015 pukul: 07: 35 WIB.
- Dwiyanto, Agus. (2006). Penilaian kinerja organisasi publik seminar kinerja organisasi sektor publik, kebijakan dan penerapannya. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Erlangga Hadari, Nawawi. (2001). Manajemen sumber daya manusia Konsep, Teori dan pengembangan dalam konteks organisasi publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson James L. (2002). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta.
- Handayani, Soewarno. (1994). Efektivitas organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hastuti, dkk. (2015). *Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat*. Lembaga Penelitian SMERU: Jakarta. diakses pada tanggal 05 Januari 2016 pukul: 12:49 WIB
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. (2014). *Rakor Evaluasi Triwulan I dan Pendalaman hasil Kajian KPK Terhadap Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah(Raskin)*. Jakarta. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul: 15;23:33 WIB.
- Laksono, A. (2015). *Buku Pedoman Umum Raskin*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. http://www.raskin.web.id/files/pedum/Pedum_Raskin_2015.pdf diakses pada tanggal 22 September 2015 pukul: 19:17 WIB
- Mailani, D. (2015). *Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015. <http://Jurmafis.untan.ac.id>, diakses pada tanggal 22 September 2015 pukul: 18:42 WIB
- Michell. (1989). Efektivitas. Jakarta: Erlangga
- Setiana, A. (2012). *Pedoman Umum Penyaluran Raskin*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. http://www.raskin.web.id/files/pedum/Pedum_Raskin_2012.pdf diakses pada tanggal 05 Januari 2016 puku: 12:54 WIB
- Steers, M Richard. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, (2008). *Metode penelitian administrasi dilengkapi dengan metode R & D*, edisirevisi, cetakan 14, CV. Alfabeta, Bandung. -----,2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
- Taufik, T. M. dan Sahuri, C. (2014). *Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 1-117. Diakses pada tanggal 22 September 2015 pukul: 18:45 WIB
- TNP2K. (2015). *Tantangan Meningkatkan Efektivitas Program Raskin*. Diakses pada tanggal 16 April 2016 pukul: 08: 35 WIB.
- TNP2K. (2012). *Tanya Jawab Tnp2k Klaster I Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Raskin*. Diakses pada tanggal 22 September 2015 pukul: 19:30 WIB.
- UNHAS, Makasar Brech E F L. (2002). The principle and practice of management. Jakarta: PT.Rineka Cipta Campbell, Reece
- Winarni, A. T. (2012). *Study Implementasi Program Raskin Di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal*. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG SEMARANG.<http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/106>, diakses pada tanggal 22 September 2015 pukul: 18:44 WIB